

Gambaran Beberapa Kasus Kredit Pedesaan di Jawa Tengah

* Sebuah Catatan Perjalanan

Oleh : Edy Suandi Hamid



Edy Suandi Hamid adalah dosen negeri yang dipekerjakan pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, di samping juga sebagai staf peneliti pada Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) UGM. Lahir di Tanjung Enim 11 Desember 1957, dan menyelesaikan studi dari FE UGM jurusan ilmu ekonomi dan studi pembangunan (Umum), April 1983. Pernah menjadi wartawan dan redaksi ekonomi harian *Kedaulatan Rakyat*, serta Pemimpin Redaksi majalah *Equilibrium* (FE UGM). Kini aktif dalam kegiatan penelitian yang menyangkut masalah pedesaan. Menulis buku *Pengantar Teori Perilaku Konsumen* (bersama Prof. Mubyarto, 1986) dan *Meningkatkan Efisiensi Nasional* (bersama Prof. Mubyarto, 1987).

Usaha para perencana pembangunan di daerah Jawa Tengah untuk membantu masyarakat pedesaan, terutama golongan ekonomi lemah, memang cukup nyata. Hal ini bisa dimaklumi mengingat propinsi ini penduduknya memang sebagian besar tergolong miskin. Pendapatan per kapita penduduk Propinsi ini, termasuk golongan "papan bawah", yakni nomor 4 terendah dibanding 27 propinsi yang ada di Indonesia (tahun 1982 berdasarkan harga konstan 1975, pendapatan per kapitanya adalah Rp 82.038,31). Salah satu usaha pemerintah di Jawa Tengah untuk membantu masyarakat miskin pedesaan itu adalah dalam bentuk penyaluran dana ke pedesaan, khususnya dalam bentuk kredit, guna membantu kekurangan modal yang banyak dialami penduduk desa. Dalam tahun 1987, tercatat misalnya, sudah menyebar sebanyak 497 BKK (Badan Kredit Kecamatan) di propinsi ini, yang berarti menjangkau semua kecamatan yang ada, dengan pos operasi sebanyak 2466 buah, dan mempunyai nasabah sebanyak lebih setengah juta orang. Begitu pula BRI Unit Desa, jumlahnya mencapai 707 buah (termasuk pos pelayanan desa) dan menjangkau 368.362 orang dengan total kredit Rp. 83,5 milyar.

Tidak hanya itu lembaga kredit yang beroperasi dengan jangkauan penduduk pedesaan. Ada bank desa, lumbung desa, KUD, serta bank-bank umum pemerintah lainnya, yang melayani kredit khusus. Sementara itu, lembaga kredit semi formal dan informal juga banyak beroperasi di daerah pedesaan. Banyaknya lembaga/sumber kredit yang beroperasi untuk melayani penduduk desa ini telah menimbulkan pertanyaan : sejauh mana kompetisi di antara mereka? Apa untung ruginya bagi masyarakat desa dengan banyaknya sumber kredit tersebut?

Dari banyaknya lembaga kredit yang beroperasi di pedesaan ini, menimbulkan "nada" khawatir dari para pengelola/penanggung jawab kredit formal di pedesaan. Kekhawatiran tersebut terutama kemungkinan terjadinya "nasabah rangkap" sehingga nasabah sulit mengembalikan pinjamannya. Memang sudah ada sementara lembaga itu yang saling tukar informasi mengenai nasabah, dan juga melibatkan unsur pemerintahan desa untuk menginformasikan mengenai hal itu, namun kenyataannya hal demikian masih terjadi, sehingga agak merisaukan para pengelola tersebut.

Kekhawatiran semacam itu memang beralasan. Ini mengingat jumlah nasabah yang dilayani sangat banyak dan nilai kreditnya kecil-kecil. Di samping itu, rekomendasi dari pejabat desa, tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Sebab, mereka sendiri tidaklah mempunyai administrasi yang lengkap dan rapi mengenai siapa-siapa penduduk desanya yang meminjam di lembaga kredit. Terlebih lagi jika dari unsur pejabat desa sendiri ada kemungkinan untuk meny-

lahgunakan kewenangannya, sehingga sangat sulit bagi lembaga kredit untuk mengontrol.

Pelayanan dan Performance

Badan Kredit Kecamatan (BKK) yang beroperasi di pelosok-pelosok pedesaan dan pasar di Jawa Tengah sudah sangat dikenal di daerah itu. Dalam pelayanannya, juga cukup fleksibel, dalam artian tidak terlalu menyulitkan bagi golongan ekonomi lemah untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga ini. Jaminan fisik tidak dibutuhkan oleh BKK. Dengan persyaratan yang tidak terlalu "bank teknis" itu, maka ia dapat meluas dan menjangkau banyak nasabah. Namun konsekuensi dari persyaratan yang fleksibel itu adalah masih terbilang tingginya tunggakan pada lembaga ini (per 31 Maret 1986 *tunggakan merah* yang lebih dari 6 bulan sebesar 10,64%, dan yang kurang dari 6 bulan 5,49%).

Besarnya tunggakan ini semakin tahun semakin bertambah. Ini mengingatkan sejak berdirinya BKK tidak pernah ada penghapusan atas tunggakan-tunggakan lama, sekalipun tunggakan itu sudah jelas-jelas tidak mungkin dibayar oleh nasabah. Terhadap penunggakan juga tidak ada *penalty*. Dari pihak BPD, selaku pembina BKK, beberapa waktu terakhir ini memang sudah memikirkan untuk meninjau kembali tunggakan yang ada di BKK ini, khususnya pemikiran ke arah penghapusan atas tunggakan-tunggakan lama yang diperkirakan sudah tidak mungkin diharapkan pengembaliannya.

Dalam persaingan dengan lembaga kredit lain, khususnya dengan Kupedes BRI, pendapat dari pengelola/pembina.

BKK agaknya ada semacam kekhawatiran "kalah bersaing" dengan BRI UD tersebut. Kekhawatiran itu bisa saja terwujud dalam jangka panjang. Sebab profesionalisme dan sarana yang dimiliki BRI UD relatif lebih memadai. Plafond kredit juga jauh lebih besar, yakni sebesar RP 2 juta, sedangkan BKK hanya Rp 200 ribu. Salah satu kemenangan BKK adalah tidak adanya jaminan atas pinjaman yang diberikan.

Untuk BRI dalam melayani kredit penduduk pedesaan tampak semakin fleksibel. Mereka terus mencari bentuk pelayanan yang sesuai dengan pola kegiatan penduduk pedesaan. Semula BRI UD menyalurkan kredit Bimas, yang banyak menimbulkan tunggakan. Setelah kebijaksanaan tentang Bimas diubah, maka BRI menyesuaikan kegiatannya. Tahun 1985 diadakan relokasi BRI UD dengan membedakannya menjadi BRI UD Induk dan Pos Pelayanan Desa. Untuk pos pelayanan ini tidak menetap di satu tempat, melainkan menyesuaikan dengan irama kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam hal kredit yang diberikan sendiri, semula dibedakan menjadi dua, yaitu kredit mini (s/d Rp 200.000) dan kredit midi (s/d Rp 1 juta). Sejak 1984 Kredit midi ini sudah dihapuskan dan BRI mengenalkan kredit baru yang dikenal dengan sebutan Kupedes (Kredit Umum Pedesaan).

Kupedes ini berkembang pesat pula Jawa Tengah. Dengan bunga 18% per tahun, melalui 489 BRI UD Induk dan 207 Pos Pelayanan Desa, Kupedes bisa menarik ratusan ribu nasabah. Dengan adanya keharusan surat bukti jaminan dan sanksi *penalty* bagi penunggak, maka jumlah tunggakan Kupedes Jawa Tengah hanya 1,7% dari total kredit-

nya. Angka masih jauh dari batas toleransi yang digariskan, yakni sebesar 5%.

Kupedes relatif lebih berhasil dibandingkan kredit-kredit yang disalurkan BRI UD sebelumnya, karena beberapa hal. Antara lain adalah (a) kredit disesuaikan dengan kebutuhan dan kegiatan ekonomi masing-masing nasabah, (b) adanya perangsang (insentif) untuk peminjam yang mengembalikan tepat waktu dan (c) adanya pemantauan dan pembinaan atas nasabah. Pemantauan itu khususnya dalam penggunaan kredit, sedangkan pembinaan baru dalam tahap memadukan kegiatan antara debetur bisa lancar. Dan, jika ada nasabah yang macet, oleh petugas juga diadakan pendekatan dan pembicaraan untuk mengatasi kesulitannya.

Dalam hal prosedural, kekakuan memang masih ada pada penyaluran Kupedes, sebagaimana layaknya penyaluran kredit oleh lembaga perbankan lainnya. Ia dilakukan sesuai persyaratan bank teknis, yang memang tak bisa dielakkan oleh BRI UD karena kredit likuiditasnya berasal dari BRI. Namun dengan menyebarnya BRI UD di pedesaan, jelas dirasakan manfaatnya dalam rangka *mendekatkan* sumber modal pada masyarakat yang membutuhkan, dengan tingkat bunga relatif rendah dibandingkan dari sumber kredit per-orangan/informal.

BRI tidak hanya bertugas mengembangkan kredit pedesaan melalui BRI UD saja. BRI juga mempunyai tanggung jawab dalam mengawasi BPR (Bank Perkreditan Rakyat), yang berupa bank pasar dan badan kredit desa. Menurut data terakhir BRI, jumlah bank pasar di Jawa Tengah mencapai 37

buah, yang terdiri 18 buah berbentuk PT, 1 buah berbentuk koperasi dan 18 berbentuk Perusahaan Daerah. Sedangkan BKD terdiri dari Bank Desa sebanyak 1.553 buah (1187 aktif, 376 non-aktif) dan lumbung desa sebanyak 1.006 buah yang disebarakan juga nonaktif.

Dengan asset mencapai Rp 34,58 milyar, BPR tersebut menyalurkan kredit sebanyak Rp 28,5 milyar, pada 168 ribu nasabahnya. Dibandingkan dengan penyaluran kredit oleh BKK, maka jumlah yang disalurkan oleh BPR di Jawa Tengah ini jumlahnya sedikit lebih banyak (BKK tahun 1985 Rp 26,9 milyar). Namun jika dilihat dari jumlah nasabahnya, maka nasabah BKK lebih tiga kali lipat dibandingkan dengan jumlah nasabah BPR. Hal ini mencerminkan bahwa nasabah BKK jauh lebih gurem dibandingkan dengan nasabah BPR.

Pasar Kredit di Jepara

Salah satu mata pencaharian penduduk Kabupaten Jepara adalah sebagai nelayan. Seperti halnya mereka yang bekerja di subsektor pertanian lainnya, mereka yang bekerja subsektor perikanan ini umumnya miskin-miskin dan kekurangan dana untuk menjaga kelangsungan hidup dan usahanya. Ini berlaku pula bagi mereka yang menjadi pedagang ikan yang gurem-gurem, yang membawa hasil belian ikannya dari nelayan yang baru saja melaut.

Oleh karena itu pula, tidak mengherankan apabila di daerah/desa nelayan di pinggiran kota Jepara-Bulu dan Ujung Batu banyak penawaran kredit dari berbagai pihak, baik lembaga formal maupun informal. Banyaknya

suplai kredit tersebut tentunya didasari oleh banyaknya *demand* atas kredit itu.

Di TPI Ujungbatu, yang di sekitarnya banyak para bakul ikan kecil beroperasi, diperoleh keterangan bahwa para pedagang ikan tersebut memperoleh kredit dari "bank Rabu" (KUD), "bank titil" (Kosipa), "bank Sabtu" (BRI UD) dan dari sumber keluarga. Di samping itu, ada pula yang menyatakan sama sekali tidak memperoleh kredit, karena merasa tidak membutuhkan tambahan dana. Dari para pedagang ikan besar ("cukong") ada pula pelayan yang memperoleh pinjaman sebelum melaut. Pinjaman ini tanpa bunga, namun dengan konsekuensi nelayan yang menerima pinjaman akan menjual hasil tangkapannya kepada pedagang besar tersebut dan dengan harga sedikit lebih rendah dibanding harga pasar.

Begitulah, para nelayan atau pedagang ikan kecil di sekitar pantai Jepara mempunyai cukup pilihan untuk mendapatkan pinjaman. Agaknya, mereka tidak pula terlalu mempersoalkan berapa tingkat bunga atas pinjamannya. Ini terbukti dari observasi dan wawancara dengan beberapa peminjam, mereka tidak mengeluh dan menghitung-hitung bunga. Yang dipersoalkan kalau ditanya mengapa meminjam di lembaga "X" adalah karena pelayanannya yang enak, cepat, petugas ramah, tidak terlalu kaku, dan sebagainya.

Keluhan terhadap pola kerja KUD dan Kosipa muncul dari mereka yang sempat diwawancarai. Keluhan berkisar dari terlalu kakunya petugas dan ketatnya kewajiban pembayaran atas utang. Dikemukakan, petugas KUD yang beroperasi di sana dikenal "tanpa kompromi" atas keterlambatan pembayaran

hutang. Mereka yang menunggak, akan kesulitan untuk mendapat pinjaman berikutnya. Bahkan ada peminjam anggota KUD yang menangis-nangis di depan petugas pelayanan kredit KUD karena setelah ia melunasi utangnya, ia tidak diperbolehkan lagi meminjam. Padahal, maksudnya melunasi hutangnya yang terlambat pengembaliannya itu adalah dengan harapan bisa menghutang lagi dari KUD.

Namun, ada warung makan yang tidak mengeluh dengan pola KUD. Ia merasakan urusannya dengan KUD lancar saja. Ia juga meminjam dari Kosipa, dan juga tidak mengeluh dengan bunga ataupun persyaratan dan pelayanan lembaga kredit tersebut.

Hal ini bisa dipahami mengingat nelayan/pedagang ikan kecil pendapatannya tidak pasti, sehingga pada saat-saat tertentu mereka sama sekali tidak mempunyai uang untuk melunasi atau mencicil hutangnya. Dengan demikian mereka mendapat teguran atau sanksi tertentu atas keterlambatan pembayaran/pencicilan hutangnya. Berbeda dengan pedagang warung makan, yang pendapatannya relatif lebih pasti dan ajeg. Ia dapat serta rutin menunaikan kewajiban atas hutangnya, sehingga tidak sering "berurusan" karena tunggak-menunggak dengan penyalur kredit.

Kosipa, yang meminjamkan uangnya secara harian, memang cukup berat bagi pedagang ikan kecil yang usahanya tidak pasti. Bahkan ada yang belum sempat "memutarakan" uang pinjaman sehari sebelumnya, ditekan untuk mengembalikan uang plus bunganya. Hal ini menyebabkan beberapa pedagang sekitar TPI Ujungbatu menjadi "alergi" meminjam pada Kosipa.

Namun anehnya, BRI Unit Desa (Pos Pelayanan Desa), yang biasanya dicap birokratis, justru dipuji karena petugasnya yang tidak kaku dan "sangat pengertian" dengan nasabahnya. Sehingga pada suatu ketika petugas tersebut mutasi ke daerah lain, para nasabah merasa kehilangan, bahkan ditangani kepindahannya. Petugas ini, dirasakan sangat akrab dengan para nelayan/pedagang kecil di sana. Ia tidak merasa rih dan selalu berbincang-bincang dengan nelayan/pedagang ikan kecil, sehingga terjalin persaudaraan yang erat.

Hal di atas menunjukkan bahwa *profil* pengurus sangat menentukan keberhasilan usaha lembaga. Suatu lembaga yang birokratis, ternyata dalam operasinya dirasakan sangat luwes dan disukai, karena pertugasnya yang lincah, supel dan bujaksana. Petugas dituntut untuk dapat beradaptasi dengan nasabahnya, dan memahami pula kesulitan/kondisi nasabah. Dengan demikian, ia tidak terlalu cepat menghukum nasabah yang terlambat mengembalikan pinjaman sebagai "nasabah yang jelek". Sebab, ia dapat melihat dan menelusuri sebab-sebab keterlambatan tersebut, sehingga dapat diambil keputusan yang bijaksana manakala keterlambatan tersebut memang bukan karena kelalaian nasabah, melainkan oleh sebab-sebab lain yang tak bisa dihindarkan.

Mengenai nelayan yang memperoleh pinjaman dari pembeli ikan besar -- melalui petugas suruhan "boss" dari Semarang tampaknya juga cukup banyak. Dengan adanya pemberian pinjaman tersebut, walaupun tidak ada perjanjian tertulis, si peminjam punya "kewajiban moral" untuk menjual ikan

pada pihak yang meminjam uang. Harga ditentukan oleh pembeli, yang selalu sedikit lebih rendah dibandingkan harga yang terjadi di pasar. Dari pinjaman itu sendiri tidak ada bunganya.

Adanya pinjaman tersebut dirasakan sangat membantu oleh para nelayan. Mereka bukan saja merasa dibantu kebutuhan dananya, tetapi juga tidak perlu memikirkan pemasaran hasil tangkapannya. Mereka juga tidak perlu memikirkan pemasaran hasil tangkapannya. Mereka juga tidak mengeluh dengan harga jual yang sedikit lebih rendah, karena mungkin mereka menyadari bahwa selisih harga tersebut adalah merupakan "biaya bunga" atas pinjamannya.

Di Jepara ini, untuk melayani nelayan, BKK juga pernah secara khusus beroperasi untuk memberi kredit. Namun hal ini sekarang sudah tidak dilakukan lagi, karena banyak kredit yang disalurkan tidak kembali. Petugas BKK juga susah untuk memaksa nasabah melunasi kredit, karena melihat kenyataan bahwa nelayan/pedagang ikan kecil yang jadi nasabahnya memang betul-betul tidak mampu untuk membayar pinjaman.

Untuk membantu nelayan supaya mempunyai alat tangkap/kapal yang modern, BRI juga menyalurkan kredit pada kelompok nelayan. Namun kredit yang disalurkan ini dapat dikatakan sepenuhnya macet, karena para peminjam tidak ada yang melunasi kreditnya. Macetnya kredit perikanan ini dikarenakan beberapa sebab, antara lain (a) nelayan penerima kredit rendah kemampuan skill/manajemennya, (b) adanya anggapan bahwa kredit tersebut adalah "hadiah" dari pemerintah. Di samping

itu, para nelayan ini mendapat saingan dari kapal-kapal lain yang tonasenya lebih besar milik pengusaha swasta besar, sehingga mereka selalu kalah dalam mendapatkan ikan lebih banyak. Dengan demikian, penghasilan yang diterima juga sulit untuk digunakan untuk membayar angsuran kreditnya.

Di samping lembaga-lembaga/usaha-usaha kredit yang disebutkan di atas, di Jepara juga ada BKD (Bank Desa dan Lumbung Desa), yang jumlahnya ada 34 buah. Meskipun pengembangan BKD ini agak "dikendalikan" untuk lebih memberi kesempatan pada pengembangan KUD, namun nasabahnya bisa mencapai 14.645 orang dengan omzet kredit Rp 593 juta.

Kredit Petani Tembakau Temanggung

Petani tembakau di Temanggung yang ingin mendapatkan pinjaman dari lembaga perbankan formal umumnya memanfaatkan fasilitas kredit ITR (Intensifikasi Tembakau Rakyat), yang disalurkan oleh Bank Ekspor Impor (Exim). Kerja sama penyaluran kredit ini dilakukan dengan Ditjen Perkebunan. Tujuannya adalah agar petani tembakau tidak terjerat ijon dan bisa meningkatkan taraf hidupnya ke tingkat lebih baik.

Namun tujuan tersebut belum mewujudkan. Bahkan, dari kredit yang disalurkan banyak yang macet. Penyebab dari tingginya tunggakan ini (1985 sebesar 42%), adalah di samping pendapatan petani tembakau sangat fluktuatif, juga karena dalam lima tahun terakhir ini produksi tembakau agak jelek/merosot, karena musim yang tidak mendu-

kung. Hal ini ditambah lagi oleh adanya kenyataan bahwa petani yang mendapatkan kredit massal ITR ini sebelumnya terpaksa meminjam dari kredit perorangan yang berbunga tinggi, sebagai akibat tidak sesuainya waktu turunnya kredit ITR dengan kebutuhan petani akan dana. Lambatnya pencairan ITR ini dikarenakan lambatnya SK Mentan untuk mencairkan kredit ITR ini. Biasanya petani tembakau Temanggung mulai tanam bulan Januari, sedangkan SK Mentan baru turun pada bulan April/Mei.

Bagi petani, keterlambatan tersebut jelas sangat berarti. Mereka tidak bisa menunggu SK Mentan, baru mulai tanam. Oleh karena itu, mereka terpaksa mencari pada sumber-sumber kredit lain, walaupun dengan "harga" yang mahal. Misalnya, mereka ada yang meminjam pada sumber kredit perorangan dengan sistem "ngelimolasi", yang artinya setiap musim ia harus mengembalikan pinjamannya sebesar 1,5 kali dari pinjaman semula (dengan bunga 50%). Tidak hanya bunga saja yang memberatkan apabila petani meminjamkan dari pelepas uang, melainkan juga terkadang ada kewajiban untuk menjual tembakau pada si pelepas uang. Adanya perjanjian ini membuka petani semakin lemah posisinya dalam tawar-menawar. Sehingga mereka lebih sering dirugikan oleh harga yang ditetapkan para pelepas uang, yang kebanyakan adalah pedagang ataupun "perpanjangan tangan" dari pabrik rokok.

Jika Bank Eksim memberikan kredit massal untuk petani tembakau, maka Bank Rakyat Indonesia memberikan pinjaman pada individual. Seperti

halnya kredit ITR, kredit yang disalurkan BRI juga bertahap, dan ini sudah menjangkau sekitar 3000 nasabah petani tembakau Temanggung. (Nilai tidak tercatat).

Dari penyaluran kredit untuk petani tembakau ini terlihat bahwa kekakuan birokrasi menyebabkan timbulnya kesenjangan waktu antara kebutuhan dana dan pencarian dana. Hal ini ternyata berakibat buruk bagi petani, dan memberikan peluang untuk tumbuh subur nya pelepas uang. Sebab para pelepas uang, yang punya hubungan dengan pabrik rokok, mempunyai peluang untuk bergerak dan mengisi kekosongan dana itu.

Di samping itu, dari kredit ITR memberi contoh lagi bahwa kredit massal cenderung untuk macet. Ini bisa jadi karena sifatnya massal, maka rasa tanggung jawab menjadi kurang. Kekhawatiran menanggung resiko juga kurang jika dibandingkan kalau ia meminjam sendiri.

Kredit Pedesaan di Kebumen.

Seperti daerah lainnya, untuk lembaga formal yang paling utama menyalurkan kredit pedesaan di Kebumen adalah BRI, yang di Kebumen saat ini mempunyai 6 BRI Unit Desa Induk dan 13 Pos Pelayanan Desa. Ditambah pula sebanyak 145 Badan Kredit Desa yang di bawah pengawasan BRI, yang sampai akhir Maret lalu tercatat memiliki 15.758. nasabah dengan kredit sebesar Rp 603 juta.

Dari jumlah kredit sebesar Rp 603 juta itu, sebagian besar dipinjamkan dengan sistem *mingguan* (Rp 364,5 juta), *diikuti* dengan *lapanan* (Rp 207,6

juta) dan musiman (31,1 juta). Jadi, sebagian besar kredit yang disalurkan adalah dengan jangka waktu yang sangat pendek. Hal ini sesuai pula dengan peminjamnya, yang sebagian besar adalah kelompok pedagang kecil, dan hanya sebagian kecil dari petani. Para pedagang agaknya lebih gesit dalam memanfaatkan sumber-sumber kredit yang ada.

Untuk BRI Unit Desa, s/d Agustus sudah menyalurkan kredit sebanyak Rp 1,4416 milyar dengan nasabah sebanyak 6.293 orang, atau rata-rata per nasabah sekitar Rp 229 ribu. Dana yang disalurkan ini masih jauh di atas dana yang berhasil dihimpun oleh BRI UD dari Tabanas dan Simpedes yang totalnya hanya Rp 464 juta.

Di samping BRI UD, di daerah Kebumen juga beroperasi lembaga kredit seperti BKK, Kosipa, Kospin, KUD dan penyalur kredit perorangan. Juga ada suatu lembaga kredit yang dimiliki oleh desa, yaitu Lembaga Pembiayaan Pembangunan Desa (LPPD). Lembaga yang terakhir ini ide dasar pembentukannya adalah untuk memerangi ijon. Dan, memang pengijon bisa diberantas, khususnya di Babadsari, namun demikian tunggakan pada LPPD ini masih cukup besar.

Potensi Menabung Masyarakat Desa.

Sering dikemukakan bahwa penduduk pedesaan sangat kekurangan dana, sehingga perlu disalurkan bantuan kredit kepedesaan. Namun demikian ini tidak berarti bahwa masyarakat desa sama sekali tidak punya *surplus* dari pendapatannya setelah dikonsumsi. Namun selisih antara pendapatan de-

ngan konsumsi ini, tidak selalu ditabungkan dalam bentuk uang di lembaga keuangan formal. Penduduk desa yang mempunyai kelebihan dana ini bisa menyimpan sendiri uangnya, atau dibelikan dengan barang-barang berharga, seperti emas.

Dengan dikenalkannya Simpedes oleh BRI, tersebut bahwa potensi menabung masyarakat desa cukup besar. Dan potensi itu bisa digali jika lembaga keuangan formal bisa "membaca" selera masyarakat desa tersebut, sehingga bergerak untuk menabung di lembaga formal. Dalam hal ini BRI melakukannya dengan memberikan kesempatan setiap saat bagi si penabung untuk mengambil uangnya, dan diberi perangsang hadiah-hadiah yang menarik atas tabungan tersebut. Untuk seluruh Jawa Tengah sampai dengan akhir Agustus 1986 Simpedes ini mencapai nilai Rp 9,937 milyar dengan penabung sebanyak 59,704 orang. Dibandingkan dengan Tabanas yang jauh lebih dulu dilaksanakan, nilai tabungan Simpedes ini sudah sekitar dua pertiganya.

Meskipun tidak menunjukkan data kuantitatif, dari BRI Jepara dan Temanggung menyatakan bahwa Simpedes berkembang dengan pesat, jauh di atas Tabanas. Bahkan, ada kekhawatiran bahwa Simpedes ini akan menyaingi dan menarik penabung Tabanas untuk beralih ke Simpedes. Sementara itu di Kebumen, kendati baru dikenalkan bulan Mei yang lalu, Simpedes sudah berhasil memobilisir dana sebanyak Rp 173,7 juta, sedang Tabanas mencapai Rp 290,7 juta.

Demikianlah, dari Simpedes ini memberikan bukti pada kita bahwa

potensi dana yang dapat dimobilisir sebenarnya cukup besar di pedesaan. Masyarakat desa juga punya keinginan menabung, apabila mereka melihat secara nyata ada perangsang dan kemudahan dalam menabung dan menarik tabungannya tersebut apabila ia membutuhkan uangnya. Mungkin saja masih ada pola-pola lain, yang bisa lebih meningkatkan pengumpulan dana masyarakat desa ini, misalnya dengan "tabungan dijemput" seperti yang sudah dilakukan di Sumatera Barat dan beberapa bank di Bali. Hal ini perlu diteliti jika kita ingin mengoptimalkan mobilitasi dana dari penduduk desa, dan tentunya untuk dimanfaatkan pula bagi kepentingan penduduk desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Jenifer, *Pasar, Pasaran, Trade, Traders and Trading in Rural Java*, Disertasi Doktor, Sidney University, Sidney, 1984.
- Edy Suandi Hamid dkk, *Dua Model Pelaksanaan Program Kredit Pedesaan di Jawa Tengah : Satu Studi Kasus*, disampaikan dalam Seminar Hasil Observasi oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Jakarta, 1986.
- Mubyarto dan Edy Suandi Hamid (eds), *Kredit Pedesaan di Indonesia*, BPFE, Yogyakarta, 1986.

